

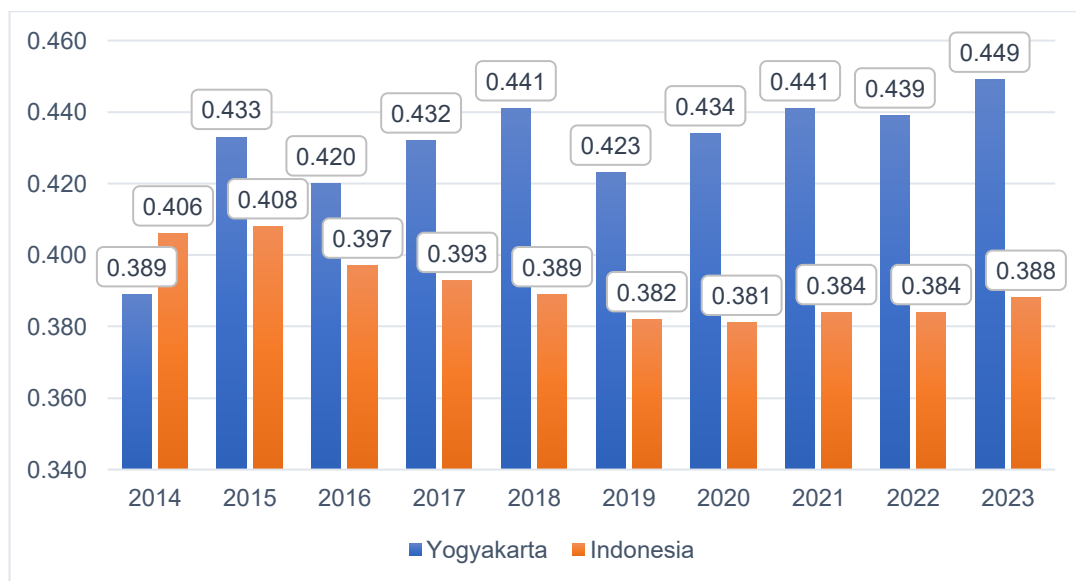
BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dengan beragam destinasi wisata dan budaya, yang menjadikannya salah satu kota yang dituju wisatawan untuk bepergian. Hal ini tentunya memiliki dampak positif bagi D.I. Yogyakarta sendiri terutama pada sektor perekonomian. Namun meskipun demikian, Provinsi Yogyakarta memiliki beberapa masalah yang berkaitan dengan bidang perekonomian. Salah satunya mengenai masalah ketimpangan. Menurut (Hornby, Albert Sydney, 1995) ketimpangan sendiri merupakan suatu keadaan yang tidak setara (*equal*), terutama dalam status, hak, dan kesempatan. Hal ini tentunya bertolak belakang, mengingat Provinsi Yogyakarta memiliki sumber daya berupa destinasi wisata dan menjadikannya sebagai provinsi yang dituju wisatawan dan banyak orang juga akhirnya menetap di Provinsi Yogyakarta serta menjadi pembeda diantara provinsi-provinsi lainnya. Namun kenyataannya justru Provinsi Yogyakarta menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan yang tinggi. Melalui penelitian ini akan ditampilkan juga beberapa factor yang menjadi tolak ukur dalam melihat perbedaan tingkat ketimpangan dengan provinsi lainnya.

Ketimpangan sendiri juga merupakan suatu kondisi dimana tidak meratanya perekonomian pada suatu wilayah yang tidak sebagaimana mestinya. Contohnya seperti pendapatan yang berbeda di antara masyarakat dengan kelompok memiliki pendapatan tinggi, kelompok berpendapatan sedang, kelompok dengan pendapatan rendah dan juga masalah ketidak meratanya pembangunan ekonomi antar daerah (Sugiarti & Erdkhadifa, 2023). Artinya semakin tinggi tingkat ketimpangan maka semakin tinggi juga terjadinya

perbedaan tingkat perekonomian antara setiap lapisan masyarakat. Dan juga (Ardyansyah et al., 2022) menyebutkan bahwa ketimpangan yang tinggi dapat berakibat buruk bagi kehidupan sosial dan dapat menjadi penyebab konflik. sehingga ketimpangan menjadi masalah perekonomian yang perlu untuk diperhatikan.



Gambar 1. 1 Perbandingan Gini Ratio Provinsi Yogyakarta Dengan Indonesia

Sumber: Situs Badan Pusat Statistik

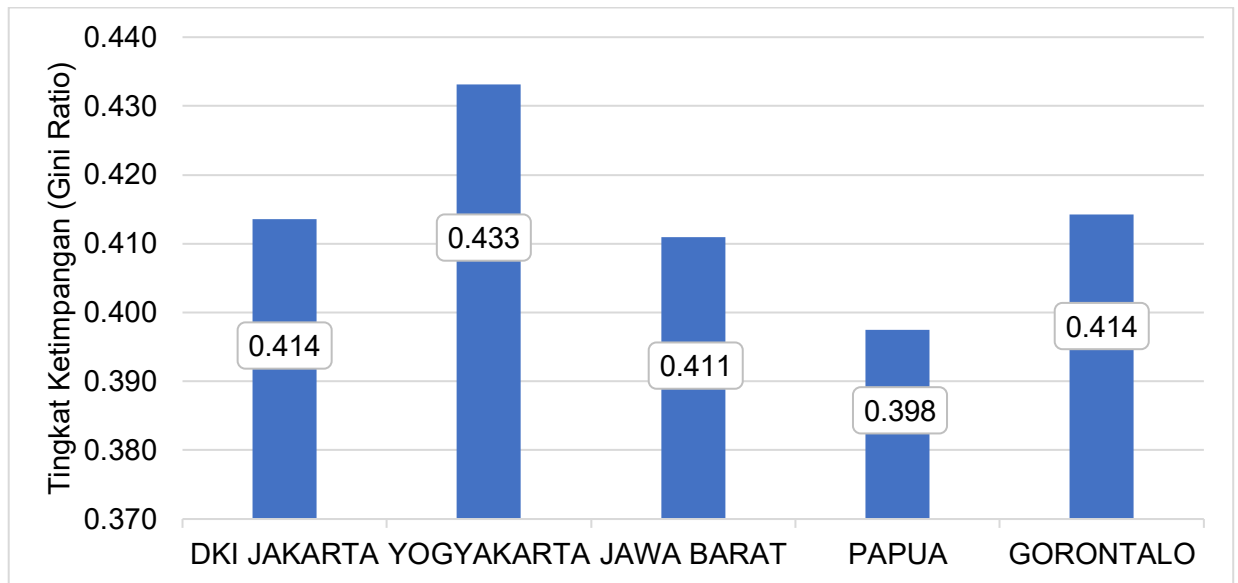
Pada gambar 1.1 menunjukkan data perbandingan antara tingkat ketimpangan di Provinsi Yogyakarta dengan ketimpangan di Indonesia. Tingkat ketimpangan di provinsi Yogyakarta berada pada tingkat yang tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia. Pada gambar 1.1 juga ditunjukkan bahwa tingkat Gini Ratio atau tingkat ketimpangan provinsi Yogyakarta berada pada tingkat rata-rata 0.43%. Dan tingkat nilai gini ratio pada Provinsi Yogyakarta berada diatas dari keseluruhan nilai gini ratio di Indonesia, Ini juga mengindikasikan bahwa ketimpangan di Yogyakarta berada di atas rata-rata ketimpangan di Indonesia. (Rifaldo & Rejekiningsih, 2024) menyebutkan bahwa ketimpangan pada

perekonomian dapat diukur dari nilai gini ratio yang berkisar antara angka nol sampai dengan satu. Apabila nilai gini ratio mendekati angka nol artinya seluruh tingkat perekonomian terbagi secara merata, sedangkan apabila nilai gini ratio mendekati angka satu maka dapat diartikan bahwa seluruh tingkat perekonomian tidak terbagi secara merata. menurut (Nurain & Juliannisa, 2022) juga menyebutkan bahwa gini ratio berkisar dari antara 0 sampai 1, apabila mendekati 0 maka termasuk ketimpangan rendah namun apabila mendekati 1 maka termasuk ketimpangan tinggi. dengan nilai tingkat 0,43% pada nilai Gini Ratio. Menjadikan Yogyakarta menjadi salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di indonesia.

Ketimpangan di Yogyakarta merupakan salah satu masalah perekonomian yang perlu untuk segera diatasi. Terjadinya ketimpangan yang berlarut akan semakin memperburuk keadaan dan kondisi perekonomian. Ketimpangan yang tinggi juga menjadi indikator bahwa tingkat perbedaan kondisi perekonomian yang berbeda antara beberapa lapisan masyarakat. Jika masalah ketimpangan di Yogyakarta dibiarkan berlarut maka ditakutkan perbedaan kondisi perekonomian akan semakin berbeda jauh dan menjadi ancaman munculnya masalah ekonomi yang lebih kompleks. Ketimpangan di Yogyakarta menjadi indikasi masih terdapatnya gap atau jarak pada pendapatan atau perekonomian diantara lapisan masyarakat. hal ini membuat beberapa lapisan masyarakat yang tergolong pada lapisan bawah akan semakin kesulitan mendapatkan kehidupan yang layak. mengingat ketimpangan di Provinsi Yogyakarta merupakan salah satu daerah dengan tingkat ketimpangan tertinggi yang tercatat pada Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini berarti gap dan juga perbedaan kondisi masyarakat di Yogyakarta tergolong berada pada jarak yang tinggi antar setiap elemen masyarakat.

Dalam beberapa waktu terakhir, ketimpangan di Yogyakarta masih menjadi masalah yang serius. Berdasarkan gambar 1.1 ditunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tingkat ketimpangan Yogyakarta mengalami kondisi yang stagnan. dimulai pada Tahun 2014 Badan Pusat Statistik mencatatkan tingkat ketimpangan di Yogyakarta berada pada tingkat 0,389. pada tahun yang menjadi fokus penelitian ini merupakan tingkat terendah pada tingkat ketimpangan di Yogyakarta. sebagai bahan perbandingan, ditampilkan juga tingkat gini ratio di Indonesia yang dimana nilai gini ratio Indonesia masih berada dibawah Provinsi Yogyakarta. lalu pada tahun-tahun berikutnya, Provinsi Yogyakarta terus mengalami kenaikan tingkat ketimpangan. hingga pada tingkat tertingginya yaitu pada tahun terakhir atau tepatnya pada tahun 2023 tercatat ketimpangan tertinggi Yogyakarta mencapai angka 0,449 yang dimana merupakan tingkat yang tinggi jika dibandingkan dengan gini ratio di Indonesia. berbeda jauh dengan gini ratio di Indonesia yang tercatat tingkat tertingginya pada tahun 2015 yaitu berada pada posisi 0,408 dan terus mengalami penurunan pada Tahun 2023 terakhir tercatat sebesar 0,388.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai ketimpangan di Yogyakarta dan mengemukakan beberapa alasan dibalik tingginya ketimpangan di Yogyakarta sendiri. Jika kita melihat Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan beberapa destinasi wisata yang beragam. Seharusnya Yogyakarta mampu untuk menjadi daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pada kenyataannya justru ketimpangan Yogyakarta menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.



Gambar 1.2 Rata-Rata Daerah Dengan Tingkat Ketimpangan Tertinggi di Indonesia Tahun 2014-2023.

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Berdasarkan Gambar 1.2 yang menunjukkan hasil perbandingan dari beberapa daerah dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia berdasarkan nilai Gini Ratio. Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat angka tertinggi sebesar 0,433, yang menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di wilayah ini paling besar dibandingkan daerah lain. Ketimpangan ini kemungkinan disebabkan oleh dominasi sektor informal, perbedaan pendapatan antar wilayah, konsentrasi aktivitas ekonomi di pusat kota, dan beberapa penyebab ketimpangan lainnya.

Tingginya tingkat ketimpangan merupakan permasalahan dalam sektor perekonomian, karena mencerminkan adanya kesenjangan kondisi ekonomi di antara berbagai lapisan masyarakat. Sejumlah penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama ketimpangan adalah perbedaan pendapatan antar individu. Pendapatan seseorang sangat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang dimiliki serta sistem distribusi upah yang berlaku. Variasi tingkat pekerjaan juga menghasilkan perbedaan upah yang signifikan, sehingga

turut berkontribusi terhadap fluktuasi tingkat ketimpangan dalam masyarakat. Jenis pekerjaan yang dapat diakses oleh individu umumnya ditentukan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki, di mana semakin tinggi pendidikan, semakin besar peluang untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi.

Namun demikian, kondisi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan anomali. Meskipun wilayah ini memiliki tingkat pendidikan yang tergolong tinggi, Yogyakarta justru mencatatkan Gini Ratio tertinggi di Indonesia. Idealnya, tingkat pendidikan yang baik akan berdampak pada distribusi pendapatan yang lebih merata. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain di luar pendidikan yang turut memengaruhi tingginya tingkat ketimpangan di wilayah tersebut. Permasalahan yang kemudian muncul adalah apakah pendidikan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan namun masih menghadapi tingkat ketimpangan yang cukup tinggi dan bagaimana dampak dari adanya pengangguran dan kemiskinan terhadap tingkat ketimpangan di Yogyakarta.

Melalui (Ariska Putri, 2023) disebutkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang akan berpengaruh kepada upah yang didapat saat bekerja. Dan juga pekerja yang berpendidikan dan berpengalaman akan memiliki upah lebih besar dari rekan kerja yang kurang berpendidikan, hal tersebut dapat mengakibatkan ketimpangan pendapatan (Juster, 1974). berdasarkan gagasan tersebut menjelaskan bahwa pendidikan dapat mengakibatkan ketimpangan artinya semakin tinggi pendidikan maka semakin rendah tingkat ketimpangan. Sebagai analogi, jika semakin banyak dan tinggi tingkat presentase pendidikan maka semakin banyak orang bekerja dan tingkat

rata-rata orang akan mendapatkan pekerjaan serta berpenghasilan juga akan meningkat. Hal ini tentunya akan mengurangi tingkat ketimpangan karna rata-rata semua orang akan mendapatkan penghasilan. (Ariska Putri, 2023) juga menyebutkan bahwa penawaran pekerjaan yang saat ini lebih banyak membutuhkan pekerja terdidik, sedangkan mayoritas masyarakat yang masih berpendidikan rendah di Indonesia menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan. Sedangkan (Wahyuni & Monika, 2016) menyebutkan bahwa tenaga kerja dengan pendidikan tinggi akan mendapatkan pendapatan yang tinggi. Sebaliknya, tenaga kerja dengan pendidikan rendah akan mendapatkan pendapatan yang rendah. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan ketimpangan.

Menurut penjelasan diatas. dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan. hal ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu melalui (Pedro S. Martins, Pedro T Pereira., 2004) juga menyatakan bahwa pendidikan memiliki dampak yang positif terhadap ketimpangan pendapatan.

Tabel 1. 1 Tingkat Pendidikan (Tahun Lama Bersekolah) Provinsi Yogyakarta.

Tahun	Kabupaten/Kota					
	D.I. Yogyakarta	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2014	8,84	8,20	8,74	6,45	10,28	11,39
2015	9,00	8,40	9,08	6,46	10,30	11,41
2016	9,12	8,50	9,09	6,62	10,64	11,42
2017	9,19	8,64	9,20	6,99	10,65	11,43
2018	9,32	8,65	9,35	7,00	10,66	11,44
2019	9,38	8,66	9,54	7,13	10,67	11,45
2020	9,55	8,86	9,55	7,21	10,91	11,46
2021	9,64	9,02	9,57	7,30	10,92	11,72
2022	9,75	9,17	9,59	7,31	10,94	11,89
2023	9,83	9,18	9,79	7,32	11,01	12,11

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Yogyakarta

Berdasarkan data tabel 1.1, ditampilkan data terkait Pendidikan di Provinsi Yogyakarta dan kabupaten/kota yang termasuk Daerah Provinsi Yogyakarta. data pendidikan tersebut diambil berdasarkan capaian lama bersekolah (Tahun). Terlihat beberapa daerah dengan tingkat lama bersekolah yang tergolong rendah. seperti yang terlihat pada Kabupaten Gunung Kidul yang menunjukan nilai tingkat lama bersekolah cukup rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi lainnya. pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul berada pada tingkat rata-rata 6,98 Tahun. hal ini tentunya tergolong rendah karena berkaca terhadap daerah yang lainnya di provinsi ini. sesuai dengan pendapat (Wahyuni & Monika, 2016) yang menyatakan bahwa tenaga kerja dengan pendidikan tinggi akan mendapatkan pendapatan yang tinggi. Sebaliknya, tenaga kerja dengan pendidikan rendah akan mendapatkan pendapatan yang rendah. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan ketimpangan. Tentunya dengan perolehan tingkat pendidikan yang tergolong rendah dapat memperbesar tingkat ketimpangan. Namun mengingat Provinsi Yogyakarta yang didominasi oleh banyaknya sektor informal. maka masih menjadi tanya jawab mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat ketimpangan. namun tentunya dengan tingkat pendidikan yang rendah juga berpengaruh tidak hanya terhadap ketimpangan namun juga dapat mempengaruhi masalah perekonomian yang lain seperti pengangguran dan kemiskinan.

Tingkat pendidikan terendah selanjutnya pada Provinsi Yogyakarta terdapat pada Kabupaten Kulon Progo yakni berada pada angka 8,73 Tahun. jarak rata-rata tahun dari nilai Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo berada pada jarak yang cukup signifikan. hal ini menandakan juga adanya perbedaan kondisi pendidikan yang berbeda dan hal ini diduga mempunyai dampak terhadap ketimpangan. pada tingkat pendidikan selanjutnya berada pada

Kabupaten Bantul dengan angka rata-rata 9.35 Tahun dan Kabupaten Sleman dengan angka rata-rata 10.70 Tahun. dan pada posisi tertinggi berada di Kota Yogyakarta dengan capaian angka rata-rata 11.57 Tahun. melihat tingkat rata-rata antara posisi terendah di Kabupaten Gunungkidul dengan tingkat rata-rata pendidikan tertinggi yakni di Kota Yogyakarta memiliki tingkat jarak yang lumayan jauh.

Beberapa penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa pendidikan yang rendah dapat memicu dan mempengaruhi tingkat ketimpangan. dengan rendahnya tingkat pendidikan tentunya dapat memicu beragam permasalahan perekonomian seperti pengangguran dan kemiskinan.

Apabila melihat beberapa sumber penelitian, (Shinetiara & Adry, 2023) menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan terjadi ketika adanya kesenjangan pendapatan penduduk yang berpenghasilan tinggi dengan penduduk yang berpenghasilan rendah. Sesuai dengan pembahasan diatas mengenai dampak terhadap pendapatan dan kesempatan kerja akibat dari adanya tingkat pendidikan yang rendah maka daerah dengan pendidikan yang rendah berpotensi untuk mengalami tingkat pendapatan yang rendah.

Tingkat pendapatan yang rendah akibat rendahnya tingkat pendidikan bagi kelompok masyarakat dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Ini terjadi karena masyarakat dengan pendapatan rendah cenderung kesulitan bahkan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primernya. Tingkat kemiskinan juga dapat menjadi indikator dalam melihat tingkat ketimpangan. Sesuai dengan pembahasan awal mengenai pengertian ketimpangan yaitu adanya perbedaan kondisi perekonomian antara golongan masyarakat atau daerah maka tingkat ketimpangan dapat

diinterpretasikan dengan melihat tinggi atau rendahnya tingkat kemiskinan. Penduduk yang berpenghasilan rendah beresiko untuk tidak dapat atau kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika penduduk berpenghasilan rendah dan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya maka akan beresiko menambah jumlah tingkat penduduk miskin. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa kemiskinan dapat juga mempengaruhi tinggi maupun rendahnya tingkat ketimpangan.

Tabel 1. 1 Tingkat Kemiskinan (Persen) Provinsi Yogyakarta tahun 2014 - 2023

Tahun	Kabupaten/Kota					
	D.I. Yogyakarta	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2014	14.55	20.64	15.89	20.83	9.50	8.67
2015	13.34	20.3	14.55	19.34	8.21	7.70
2016	13.34	20.3	14.55	19.34	8.21	7.70
2017	13.02	20.03	14.07	18.65	8.13	7.64
2018	12.13	18.3	13.43	17.12	7.65	6.98
2019	11.7	17.39	12.92	16.61	7.41	6.84
2020	12.28	18.01	13.5	17.07	8.12	7.27
2021	12.8	18.38	14.04	17.69	8.64	7.69
2022	11.34	16.39	12.27	15.86	7.74	6.62
2023	11.04	15.64	11.95	15.6	7.52	6.49

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Yogyakarta. 2023

Berikut tabel 1.2 yang berisi mengenai tingkat kemiskinan di provinsi Yogyakarta. menurut (Sugiyarto *et al.*, 2016) menyebutkan bahwa antara kemiskinan dan ketimpangan memiliki hubungan yang pragmatis, atau dalam arti lain kemiskinan disebabkan oleh adanya ketimpangan dan ketimpangan dapat memperburuk kemiskinan. Lalu jika melihat dari tabel 1.2 yang menunjukkan data tingkat kemiskinan lebih tepatnya terkait akumulasi tingkat kemiskinan tertinggi dan terendah di Provinsi Yogyakarta. Tingkat kemiskinan tertinggi Provinsi

Yogyakarta berada di daerah Kabupaten Kulonprogo dengan tingkat kemiskinan sebesar 18.54%. di ikuti

Dengan tingkat kemiskinan yang tinggi menjadi indikasi awal tingginya tingkat ketimpangan. Kaitan antara ketimpangan dan kemiskinan telah banyak menjadi bahan penelitian dan temuan. Kemiskinan sendiri dapat diartikan ketika seseorang atau masyarakat tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupannya. Kemiskinan sendiri juga berkaitan dengan tingkat perolehan pendapatan. Umumnya kemiskinan diakibatkan adanya perolehan pendapatan yang tidak sesuai dengan biaya kehidupan dasar. Tentunya terdapat perbedaan antara penerimaan pendapatan pada setiap orang dan perbedaan pendapatan dapat memicu ketimpangan, dengan analogi demikian maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan erat kaitannya dengan ketimpangan. Namun pada studi kasus di Provinsi Yogyakarta seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa di Yogyakarta didominasi oleh sektor industri informal dimana kemiskinan akan cenderung lebih cepat mengalami kenaikan. dikarenakan tingkat kemiskinan akan bergantung terhadap tingkat musiman. Seperti pada contohnya, salah satu industri informal adalah penggiat umkm atau pengelola tempat wisata di Yogyakarta yang tentunya sangat bergantung terhadap musim liburan dan hari besar.

Pada tingkat berikutnya, kemiskinan tertinggi kedua setelah kulonprogo adalah gunungkidul. yang pada pembahasan sebelumnya telah diperoleh data bahwa tingkat pendidikan di gunungkidul merupakan tingkat pendidikan terendah diantara daerah lainnya pada Provinsi Yogyakarta. tingkat kemiskinan di gunungkidul berada pada angka 17.81% yang dimana menduduki tingkat kemiskinan tertinggi kedua setelah kulonprogo. hal ini tentunya memiliki keterkaitan masalah dengan tingkat ketimpangan sosial. seperti dijelaskan

sebelumnya bahwa masalah kemiskinan umumnya erat kaitannya dengan perolehan pendapatan. kemiskinan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak dapat dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup pokoknya. semakin jauh jarak penduduk miskin dengan penduduk kaya maka jurang ketimpangan akan semakin tinggi. hal ini merujuk juga pada tinggi dan rendahnya pendapatan masyarakat, semakin jauh jarak perbedaan atau kesenjangan antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan masyarakat yang berpendapatan rendah maka semakin tinggi juga tingkat ketimpangan yang terjadi. dan rendahnya pendapatan masyarakat merupakan penyebab utama adanya kemiskinan (Hidir & Jonyanis, 2017). dengan begitu tingkat kemiskinan di provinsi yogyakarta dapat berpotensi menjadi salah satu pengaruh dan memiliki keterkaitan dalam tingkat ketimpangan di provinsi yogyakarta.

Pengaruh perolehan dan pembagian upah juga terkait dengan tingkat pengangguran. adanya ketidaksesuaian permintaan dengan penawaran tenaga kerja dapat meningkatkan tingkat pengangguran. dan tingkat pengangguran yang tinggi juga dapat mengakibatkan tingkat ketimpangan jauh semakin tinggi. penduduk miskin rata-rata didominasi oleh pengangguran dan makna pengangguran sendiri merupakan keadaan dimana seseorang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan juga kesulitan saat mencari pekerjaan. pengangguran juga menjadi masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh daerah lain, tidak terkecuali oleh daerah provinsi yogyakarta. menurut (Nadya & Syafri, 2019) menyebutkan jika pengangguran sendiri berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan. pengangguran dapat mempengaruhi tinggi dan rendahnya tingkat ketimpangan. ketika seseorang atau sekelompok masyarakat tidak mendapatkan pekerjaan dan kesulitan mendapatkan pekerjaan, pada akhirnya mereka kesulitan

untuk memenuhi kebutuhannya. dengan begitu ketika pengangguran meningkat maka dengan seharusnya tingkat ketimpangan juga akan meningkat., karna menurut penjelasan diatas tingkat pengangguran yang tinggi berpotensi untuk meningkatkan tingkat ketimpangan. dan juga berlaku sebaliknya ketika pengangguran berhasil diatasi dan menurun maka dengan seharusnya tingkat ketimpangan juga akan menurun.

Tabel 1. 2 Tingkat Persentase Pengangguran Provinsi Yogyakarta

Tahun	Kabupaten/Kota					
	D.I. Yogyakarta	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2014	3,33	2,88	2,57	1,61	4,21	6,35
2015	4,07	3,72	3,00	2,90	5,37	5,52
2016	5,61	2,81	3,00	2,31	4,42	5,14
2017	3,02	1,99	3,12	1,65	3,51	5,08
2018	3,35	1,49	2,72	2,07	4,40	6,22
2019	3,14	1,80	3,06	1,92	3,93	4,80
2020	4,57	3,71	4,06	2,16	5,09	9,16
2021	4,56	3,69	4,04	2,20	5,17	9,13
2022	4,06	2,80	3,97	2,08	4,78	7,18
2023	3,69	2,40	3,78	2,09	4,47	6,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Yogyakarta

Berikut penyajian data mengenai tingkat pengangguran beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Yogyakarta. data tersebut dihimpun dari situs Badan Pusat Statistik Provinsi Yogyakarta. terlihat beberapa tingkat pengangguran tertinggi berada pada kota Yogyakarta. tingkat pengangguran terbuka pada kota yogyakarta berada pada angka 6.47%. pada tingkat pengangguran tertinggi kedua setelah kota Yogyakarta adalah daerah Kabupaten Sleman dengan tingkat pengangguran terbuka menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Yogyakarta berada

pada angka 4.54% dan disusul oleh kabupaten Bantul dengan tingkat pengangguran terbuka pada angka 3.33%

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi acuan dalam melihat tingkat ketimpangan. pengangguran yang tinggi juga dapat memicu kenaikan tingkat ketimpangan. permasalahan pengangguran sendiri umumnya dipicu oleh adanya ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. dimana adanya permintaan tenaga kerja dengan beberapa kriteria tidak sesuai dengan kondisi tenaga kerja yang diminta seperti minimal pendidikan yang diselesaikan atau dengan penguasaan keahlian yang diminta oleh pasar tenaga kerja. ketidaksesuaian pemberian upah juga berdampak terhadap tingkat pengangguran. kaitan antara pengangguran dengan tingkat ketimpangan terjadi ketika tingkat pengangguran semakin tinggi dan tingkat pembagian upah menjadi tidak merata. jika pengangguran tinggi maka dengan kata lain beberapa populasi masyarakat yang tidak bekerja juga meningkat. maka alokasi pemberian upah hanya terjadi pada orang yang bekerja dan hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan.

Kondisi industri informal di Yogyakarta tentunya menjadi tantangan dalam menyelesaikan masalah tingkat pengangguran. fokus penyelesaian tingkat ketimpangan dapat dimulai dari penurunan tingkat pengangguran. penurunan tingkat pengangguran dapat diatasi dengan bantuan pada sektor pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia. agar tercapainya kesesuaian antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan adanya keterkaitan antar setiap variabel dengan ketimpangan. dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Provinsi Yogyakarta tentunya menjadi sebuah pertanyaan apakah dengan kondisi

dominasi pasar industri informal, tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan.

Tingkat pengangguran pada umumnya memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Wilayah dengan tingkat pengangguran yang tinggi cenderung mengalami hambatan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya akibat terbatasnya akses terhadap sumber-sumber pendapatan. Dalam konteks penelitian ini yang berfokus pada isu ketimpangan pendapatan, perlu dipahami bahwa ketimpangan tidak semata-mata berkaitan dengan selisih pendapatan individu, melainkan juga mencerminkan disparitas kesejahteraan antardaerah. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan di suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Menurut (Sukirno, 2011) menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah atau provinsi dalam periode tertentu. Atau dengan kata lain, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai keseluruhan dari tambahan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai sektor usaha di suatu daerah atau provinsi dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini mencerminkan kemampuan wilayah dalam memproduksi barang dan jasa yang pada akhirnya berdampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat.

PDRB mencerminkan total pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah, namun untuk memperoleh gambaran rata-rata pendapatan per individu dan menilai kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, indikator yang lebih tepat digunakan adalah PDRB per kapita. Menurut (Sukirno, 2011) Perhitungan PDRB Perkapita adalah dengan cara membagi jumlah PDRB keseluruhan pada suatu daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Perolehan nilai ini

dapat menggambarkan capaian pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah pada periode masa tertentu.

Tabel 1.4 PDRB Perkapita (Rupiah) Provinsi Yogyakarta

Tahun	D.I. Yogyakarta	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta
2014	25.526	17.410	18.430	17.740	26.775	60.500
2015	27.572	18.760	19.892	19.290	28.974	64.920
2016	29.553	20.140	21.263	20.730	31.286	69.170
2017	31.650	21.510	22.719	22.210	33.555	74.060
2018	34.137	24.220	24.228	23.810	36.280	79.040
2019	36.460	27.764	25.725	25.372	38.550	84.227
2020	37.694	26.898	26.597	25.359	40.570	95.591
2021	40.516	25.851	28.356	27.304	43.560	102.702
2022	44.637	32.484	31.157	30.344	47.740	113.505
2023	48.358	35.768	33.693	33.257	51.350	122.951

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Yogyakarta

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas terlihat adanya tren peningkatan pendapatan per kapita di seluruh wilayah. Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antar daerah yang mencerminkan adanya ketimpangan perekonomian. Kota Yogyakarta menjadi daerah dengan tingkat PDRB Perkapita tertinggi dibanding dengan daerah yang lain. Tercatat mengalami kenaikan dari Rp60,5 juta pada tahun 2014 menjadi Rp122,95 juta pada tahun 2023. Hal ini terjadi karna Kota Yogyakarta sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan di Provinsi Yogyakarta, yang dimana rata-rata letak sektor perdagangan, industri, jasa dan pariwisata umumnya berkumpul dan terletak di Kota Yogyakarta. Pada posisi kedua tercatat Kabupaten Sleman dengan PDRB per kapita yang meningkat dari Rp26,78 juta menjadi Rp51,35 juta dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan pusat pendidikan sehingga perekonomian dapat meningkat. Sedangkan Kabupaten Bantul dan

Gunungkidul mengalami pertumbuhan PDRB per kapita yang stabil didukung oleh sektor pertanian, industri rumah tangga, dan pariwisata. Sementara itu, Kabupaten Kulonprogo menunjukkan pola yang fluktuatif akibat dampak pandemi, namun kembali tumbuh setelahnya seiring dengan pembangunan infrastruktur seperti Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).

Secara umum, PDRB per kapita Provinsi D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan dari Rp25,53 juta menjadi Rp48,36 juta selama satu dekade terakhir. Meskipun menunjukkan kemajuan ekonomi secara makro, kesenjangan pendapatan antarwilayah tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama mengingat adanya disparitas secara signifikan yang ditunjukan antara Kota Yogyakarta dan wilayah kabupaten lainnya. hal ini tentunya mengasumsikan bahwa ketimpangan di Provinsi Yogyakarta masih tergolong cukup tinggi, yang digambarkan dengan adanya perbedaan perolehan nilai data PDRB Perkapita pada setiap wilayahnya.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Melalui pembahasan dan penjelasan diatas mengenai data hubungan antara variabel seperti tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan tingkat PDRB perkapita di Provinsi Yogyakarta. serta berdasarkan topik studi kasus permasalahan yang terjadi di daerah tersebut terkait tingginya tingkat ketimpangan, maka terumuslah dan munculah beberapa topik inti pertanyaan pembahasan dalam menjawab permasalahan yang terjadi antara lain

1. Bagaimana tingkat pendidikan Kabupaten/Kota Yogyakarta mempengaruhi terhadap tingkat ketimpangan D.I Yogyakarta?

2. Bagaimana tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota Yogyakarta berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan D.I Yogyakarta?
3. Bagaimana tingkat pengangguran Kabupaten/Kota Yogyakarta berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan D.I Yogyakarta?
4. Bagaimana tingkat PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Yogyakarta berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan D.I Yogyakarta?
5. Apakah tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Yogyakarta berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan D.I Yogyakarta?

1.3. TUJUAN

adapun dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan mengetahui jawaban dari persoalan permasalahan yang berkaitan dengan ketimpangan di Provinsi Yogyakarta. pokok penting tujuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan Kabupaten/Kota Yogyakarta berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan D.I Yogyakarta?
2. Bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota Yogyakarta berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan D.I Yogyakarta?
3. Bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat pengangguran Kabupaten/Kota Yogyakarta berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan D.I Yogyakarta?
4. Bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Yogyakarta berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan D.I Yogyakarta?
5. Bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Yogyakarta berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan D.I Yogyakarta?

1.4 MANFAAT

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini untuk pengembangan teori ekonomi makro berkaitan dengan pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, dan PDRB perkapita terhadap Ketimpangan (Gini Ratio) di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengambil periode tahun 2014 – 2023.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini untuk bahan informasi tentang pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat PDRB Perkapita terhadap Ketimpangan (Gini Ratio) di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengambil periode tahun 2014 – 2023.